

**Nama : Dela zulia pratiwi**

**Npm : 2313031079**

**Kelas : 2023 C**

**Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan**

**Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd**

**Meyta Pritandhari, S.Pd., M.Pd**

**Fanni Rahmawati, S.Pd., M.Pd**

### ***CASE STUDY***

(Studi Kasus)

#### **“Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”**

Sebagai analis ekonomi pendidikan, Anda diminta menyusun rekomendasi kebijakan dengan menjawab pertanyaan berikut:

**A. Analisis Struktur Pengeluaran**

- Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?

Jawaban:

Struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya belum efisien secara fungsional, meskipun secara normatif sudah memenuhi amanat anggaran (22% APBD). Inefisiensi ini bukan terletak pada besar kecilnya anggaran, melainkan pada ketidaktepatan alokasi terhadap tujuan peningkatan kualitas pendidikan.

Proporsi 68% untuk gaji dan tunjangan guru menunjukkan dominasi belanja pegawai yang terlalu tinggi. Namun, tingginya belanja ini tidak berbanding lurus dengan kualitas output, yang tercermin dari rendahnya literasi dan numerasi serta ketimpangan wilayah. Ini mengindikasikan adanya inefisiensi alokatif, khususnya dalam distribusi guru yang tidak berbasis kebutuhan.

- Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?

Jawaban:

Reformasi pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya perlu difokuskan pada *rebalancing expenditure*, yaitu penataan ulang komposisi anggaran agar lebih berorientasi pada kualitas dan pemerataan. Penurunan belanja pegawai dari 68% menjadi sekitar 55% tidak dilakukan melalui pemotongan gaji, melainkan melalui perbaikan tata kelola guru. Ini dilakukan dengan redistribusi berbasis kebutuhan

(*needs-based allocation*), yakni penempatan guru sesuai rasio ideal, jumlah kelas, dan kondisi wilayah, sehingga ketimpangan kota–desa dapat dikurangi. Selain itu, rekrutmen guru dikendalikan secara selektif dan difokuskan pada daerah atau bidang yang kekurangan, serta didukung insentif diferensial bagi guru yang bersedia ditempatkan di wilayah terpencil.

Peningkatan anggaran infrastruktur dari 12% menjadi sekitar 20% diarahkan pada penguatan infrastruktur digital melalui pendekatan *digital equity*, yaitu memastikan seluruh sekolah memiliki akses minimal terhadap internet, perangkat pembelajaran, dan platform digital, terutama di daerah tertinggal. Sementara itu, alokasi bantuan siswa ditingkatkan dari 8% menjadi sekitar 15% dengan pendekatan *targeted subsidy* berbasis *means-tested*, yaitu penyaluran bantuan berdasarkan kondisi ekonomi riil agar tepat sasaran, sehingga mampu menekan angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan kelompok rentan.

Efisiensi belanja administrasi dari 12% menjadi sekitar 10% dilakukan melalui digitalisasi birokrasi dan integrasi sistem data pendidikan (EMIS) untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Fungsi utama EMIS (Education Management Information System):

- ✓ Menyediakan data distribusi guru dan kebutuhan tenaga pendidik
- ✓ Memetakan kondisi sosial ekonomi siswa
- ✓ Mengidentifikasi sarana prasarana sekolah
- ✓ Mendukung monitoring dan evaluasi kinerja pendidikan

Secara keseluruhan, reformasi ini menggeser belanja dari yang bersifat rutin menuju belanja strategis yang berbasis kebutuhan dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

## B. Analisis Sumber Pembiayaan

- Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?

Jawaban:

Pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya masih sangat bergantung pada anggaran pemerintah daerah, sehingga menimbulkan permasalahan yang bersifat struktural. Ketergantungan ini terlihat dari besarnya porsi anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai, di mana sekitar 68% dari total dana pendidikan digunakan untuk

gaji dan tunjangan guru. Akibatnya, ruang anggaran yang tersedia untuk program peningkatan mutu pendidikan menjadi sangat terbatas.

Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh rendahnya alokasi untuk kebutuhan penting lainnya. Dana yang dialokasikan untuk bantuan siswa hanya mencapai 8%, sementara untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan sekitar 12%. Proporsi ini dinilai belum memadai, terutama jika dikaitkan dengan masih rendahnya capaian literasi dan numerasi siswa serta adanya kesenjangan fasilitas antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga membuat sistem pembiayaan pendidikan menjadi rentan. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi pendapatan daerah yang dapat memengaruhi kestabilan anggaran, terutama bagi daerah yang memiliki basis pajak terbatas atau masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan anggaran yang lebih proporsional dan berkelanjutan agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan secara merata.

- Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang tepat.

Jawaban:

Dalam konteks tersebut, keterlibatan sektor swasta serta pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan alternatif menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Upaya ini bukan lagi sekadar pilihan tambahan, melainkan langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP), khususnya dalam pengembangan infrastruktur digital. Melalui skema ini, perusahaan teknologi dapat berperan dalam penyediaan akses internet dan perangkat pembelajaran di wilayah terpencil, dengan kompensasi berupa insentif tertentu dari pemerintah. Selain itu, pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga perlu diarahkan secara lebih terencana dan berkelanjutan. Dana CSR yang selama ini cenderung bersifat sporadis dapat dioptimalkan untuk mendukung program beasiswa yang berbasis pada prestasi dan kebutuhan siswa. Dengan pengelolaan yang sistematis, kontribusi sektor swasta dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Di samping itu, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan instrumen pembiayaan lain seperti obligasi pendidikan daerah (education bond) untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan dalam skala besar. Skema ini memungkinkan pendanaan jangka menengah dengan manfaat yang dapat dirasakan secara berkelanjutan. Namun demikian, seluruh upaya diversifikasi pembiayaan tersebut harus diiringi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, guna mencegah potensi konflik kepentingan serta memastikan bahwa pengelolaan pendidikan tetap berorientasi pada kepentingan publik.

### C. Perbandingan dengan Negara OECD

- Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?

Jawaban:

Dalam mengadaptasi praktik dari negara-negara OECD, terdapat beberapa pendekatan yang secara realistis dapat diterapkan dalam konteks Nusantara Raya.

- 1) Penerapan sistem pembiayaan berbasis kebutuhan siswa menjadi langkah penting untuk menciptakan keadilan dalam distribusi anggaran. Dalam sistem ini, alokasi dana tidak diberikan secara merata per siswa, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Siswa dari keluarga kurang mampu, siswa berkebutuhan khusus, serta siswa yang berada di wilayah terpencil memperoleh porsi pendanaan yang lebih besar. Pendekatan ini dinilai lebih adil dibandingkan dengan sistem pembiayaan seragam yang selama ini banyak digunakan.
- 2) Penguatan evaluasi berbasis data melalui pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, proses pengambilan keputusan terkait anggaran dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur. Kebijakan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan subjektif atau kepentingan tertentu, melainkan pada data empiris yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
- 3) Peningkatan kualitas guru melalui program pengembangan profesional berkelanjutan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui sistem mentoring antar sekolah serta pemberian insentif yang berbasis pada kinerja. Dengan demikian, peningkatan kompetensi guru tidak hanya bergantung pada masa kerja atau kenaikan golongan, tetapi juga pada kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

- Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?

Jawaban:

Menurut pendapat saya, terdapat beberapa tantangan utama dalam implementasi kebijakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi  
Sistem evaluasi berbasis data belum dapat berjalan optimal karena infrastruktur teknologi informasi masih belum merata di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil.
- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)  
Tenaga pengelola data yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pendidikan di tingkat dinas masih terbatas.
- Budaya birokrasi yang belum optimal  
Praktik birokrasi di beberapa daerah belum sepenuhnya mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga menghambat implementasi sistem berbasis data.
- Permasalahan kualitas dan integrasi data  
Data pendidikan masih bersifat terfragmentasi dan belum terstandarisasi, sehingga menyulitkan proses pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
- Resistensi terhadap sistem performance-based pay  
Sebagian tenaga pendidik menunjukkan penolakan terhadap sistem berbasis kinerja karena dianggap dapat mengganggu stabilitas dan kepastian pendapatan.
- Fragmentasi kebijakan akibat otonomi daerah  
Kewenangan otonomi daerah yang luas menyebabkan perbedaan kebijakan antarwilayah, sehingga tidak ada keseragaman dalam implementasi program pendidikan.
- Perbedaan kepentingan anggaran antar level pemerintahan  
Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki prioritas anggaran yang berbeda, sehingga proses sinkronisasi kebijakan menjadi lebih kompleks.
- Proses adopsi praktik internasional yang tidak sederhana  
Penerapan standar internasional, seperti praktik dari OECD, memerlukan proses koordinasi dan negosiasi yang panjang agar sesuai dengan kondisi lokal di Indonesia.

#### D. Rancangan Reformasi

Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:

##### a) Perubahan struktur belanja

Dalam dua tahun pertama, langkah yang perlu diprioritaskan adalah menata ulang komposisi anggaran pendidikan yang selama ini terlalu banyak terserap untuk belanja pegawai. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengevaluasi penyebaran guru di setiap wilayah, karena kondisi di lapangan sering menunjukkan adanya kelebihan guru di perkotaan dan kekurangan di daerah terpencil. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah dapat mendorong redistribusi guru dengan memberikan insentif

yang layak, seperti tambahan tunjangan, kemudahan kenaikan pangkat, maupun penyediaan fasilitas tempat tinggal. Di sisi lain, pengendalian belanja juga perlu dilakukan secara bertahap, misalnya dengan membatasi rekrutmen guru baru di daerah yang sudah mencukupi. Dari langkah ini, diharapkan terjadi pengurangan porsi belanja pegawai, sehingga anggaran yang tersedia bisa dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi siswa, seperti bantuan pendidikan dan penguatan sarana berbasis teknologi.

b) Strategi peningkatan kualitas guru

Memasuki tahun ketiga dan keempat, fokus kebijakan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas guru. Upaya ini tidak cukup hanya dengan pelatihan sesaat, tetapi perlu dirancang sebagai proses yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah sistem jenjang karier guru yang berbasis kemampuan, di mana guru tidak hanya dinilai dari lama bekerja, tetapi juga dari kompetensinya. Dalam sistem ini, guru yang lebih berpengalaman dapat berperan sebagai pembimbing bagi guru lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang terus berjalan di lingkungan sekolah. Selain itu, model pelatihan juga sebaiknya lebih praktis dan kontekstual, misalnya melalui pendampingan langsung di sekolah, agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

c) Digitalisasi sekolah

Penguatan pendidikan juga tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, digitalisasi sekolah menjadi bagian penting dalam reformasi ini, terutama untuk wilayah yang selama ini masih tertinggal. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sekolah memiliki akses internet yang memadai serta perangkat pendukung pembelajaran.

Untuk mewujudkannya, kerja sama dengan pihak swasta bisa menjadi solusi yang realistis, misalnya melalui program kemitraan atau tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan cara ini, pengembangan infrastruktur digital tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah, tetapi tetap dapat berjalan secara bertahap dan merata.

d) Mekanisme monitoring dan evaluasi

Pada tahun kelima, seluruh program yang telah dijalankan perlu ditinjau kembali secara menyeluruh. Evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana kebijakan yang

diterapkan benar-benar memberikan dampak. Proses pemantauan dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti evaluasi internal oleh dinas pendidikan dengan memanfaatkan data capaian siswa, audit oleh pihak independen untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, serta pelibatan masyarakat melalui komite sekolah. Dengan adanya evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan, hasilnya dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan berikutnya. Dengan demikian, reformasi yang dilakukan tidak berhenti sebagai program jangka pendek, tetapi dapat berkembang menjadi upaya perbaikan pendidikan yang berkesinambungan.